



Pendidikan Politik Hukum Bagi Mahasiswa Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2024

Wiwin Wiwin¹M. Rachmat Sjamsu Alam²

^{1,2}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: wvn07121997@gmail.com¹

ABSTRAK

Kegiatan pendidikan politik hukum bagi mahasiswa menjelang Pemilihan Presiden 2024 bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Melalui metode seminar dan sesi tanya jawab, kegiatan ini melibatkan pemateri dari berbagai latar belakang akademis dan politisi. Diskusi berfokus pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi dengan tema "Ada Apa dengan MK: Analisis Putusan MK Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres". Kegiatan diadakan di Aula IAIN Parepare dan dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Parepare. Melalui interaksi yang dinamis antara pemateri dan mahasiswa, kegiatan ini berupaya meningkatkan pemahaman, memperluas wawasan, dan membangun keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami dan mempersiapkan diri menghadapi proses demokrasi masa depan. Kegiatan pendidikan politik hukum bagi mahasiswa dalam persiapan menyongsong Pemilihan Presiden 2024 menjadi tonggak penting dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan dan pemilih yang terinformasi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya diberikan pemahaman yang mendalam terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga dibekali dengan keterampilan kritis dan pemahaman yang lebih luas mengenai aspek hukum dan politik yang memengaruhi proses demokrasi. Melalui pemberian pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam ini, mahasiswa dapat menjadi pemilih yang lebih bertanggung jawab dan pemimpin yang terlatih dalam mengemban tugas-tugasnya di masa mendatang.

Kata Kunci : Pemilihan Presiden, Mahasiswa, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu
Tanggal Terbit : 15 Januari 2024

A. Pendahuluan

Pemilihan presiden adalah salah satu momen penting dalam proses demokrasi suatu negara. Di Indonesia, pemilihan presiden dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan merupakan puncak dari proses politik yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pemilihan Presiden tahun 2024 akan menjadi pesta demokrasi berikutnya yang akan menentukan arah kepemimpinan negara selama periode berikutnya.

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi proses politik di Indonesia. Mereka adalah agen perubahan yang mampu memahami dan menganalisis isu-isu politik dan hukum dengan baik. Namun, dalam rangka memastikan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan presiden tahun 2024, penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik dan hukum yang mengatur proses ini.

Sayangnya, masih terdapat kekurangan dalam edukasi politik dan hukum ditingkat perguruan tinggi. Beberapa mahasiswa kurang terinformasi tentang proses politik, hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta hukum-hukum yang mengatur pemilihan presiden.

Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif mahasiswa dalam proses politik nasional.

Dalam hal ini, pelaksanaan pengabdian ini didasarkan pada adanya polemik mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) akhirnya berakhir setelah Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbiru mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan yang diambil, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan tersebut yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dimana MK memberikan jalan alternatif bagi warga negara yang berumur dibawah 40 tahun dapat mencalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden jika sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Problematika pada putusan *a quo* hadir, mana kala putusan tersebut dinilai menguntungkan salah satu pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik hukum mahasiswa menjelang Pemilihan Presiden tahun 2024. Dengan memberikan edukasi yang terstruktur dan komprehensif mengenai sistem politik dan hukum Indonesia, diharapkan mahasiswa akan lebih siap dan termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses pemilihan presiden ini. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi secara positif dalam memastikan berlangsungnya proses pemilihan yang adil dan demokratis.

B. Metode Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu ketatanegaraan melalui penerapan metode pendidikan berbasis politik hukum. Kegiatan ini menitikberatkan pada upaya memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada masyarakat terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan fokus utama pada pemberian pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam, diharapkan Mahasiswa dapat lebih terinformasi dan teredukasi mengenai aspek hukum dan politik yang relevan dalam konteks ketatanegaraan.

Materi disampaikan melalui metode seminar dan Q&A antara pemateri dan Mahasiswa. Adapun pemateri yang dihadirkan yakni Dosen Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada (Wiwin, S.H., M.H.), Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare (Dirga Achmad, S.H., M.H.), dan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare (M. Rahmat Sjamsu Alam, S.H., M.H.). Adapun tema yang diangkat yaitu “Ada Apa dengan MK: Analisis Putusan MK Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres”. Kegiatan ini dilakukan di Aula IAIN Parepare dengan menghadirkan Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Parepare.

C. Hasil

Pendidikan politik hukum bagi mahasiswa menjelang Pemilihan Presiden tahun 2024 memiliki relevansi yang sangat besar dalam mengembangkan keterampilan kritis dan wawasan mendalam dalam konteks demokrasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan masa depan memegang peranan penting dalam proses demokratisasi negara. Dalam menghadapi Pemilihan Presiden, pemahaman tentang hukum dan politik menjadi landasan esensial bagi mahasiswa. Pendidikan politik hukum memungkinkan mereka untuk memahami mekanisme politik dan hukum yang mengatur pemilihan, termasuk putusan-putusan hukum yang mempengaruhi proses tersebut.

Mahasiswa memiliki peranan penting dan strategis dalam pelaksanaan pemilu 2024 dengan beberapa alasan yaitu: pertama, hal ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang konstitusi, undang-undang, dan proses pengambilan putusan

politik. Ini akan membantu mereka dalam mengambil putusan yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab dalam perhelatan demokrasi. Kedua, pendidikan politik hukum dapat membentuk sikap kritis dan analitis mahasiswa terhadap isu-isu politik dan hukum yang berkembang, memungkinkan mereka untuk mempertanyakan dan mengevaluasi argumen-argumen serta putusan-putusan yang diambil oleh pemimpin politik.

Ketiga, hal ini merangsang partisipasi aktif dalam proses politik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan politik, mahasiswa akan merasa lebih percaya diri untuk terlibat dalam diskusi, memberikan pandangan mereka, serta turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung proses demokratisasi. Dan keempat, pendidikan politik hukum menciptakan landasan yang kuat bagi pembentukan pemimpin masa depan yang terinformasi dan bertanggung jawab. Mahasiswa yang terlatih dalam pemahaman aspek politik dan hukum akan menjadi pemimpin yang mampu mengemban tanggung jawab dengan lebih baik, dengan putusan-putusan yang didasarkan pada pemahaman mendalam dan nilai-nilai demokrasi.

Kegiatan pendidikan politik hukum bagi mahasiswa menjelang Pemilihan Presiden tahun 2024 telah sukses terlaksana. Materi disampaikan melalui metode seminar yang interaktif dan sesi Tanya Jawab (Q&A) antara pemateri dan mahasiswa, menciptakan suasana diskusi yang dinamis. Para pemateri yang hadir merupakan tokoh terkemuka dalam bidang hukum dan politik: Dosen Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada (Wiwini, S.H., M.H.), Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare (Dirga Achmad, S.H., M.H.), serta Wakil Ketua DPRD Kota Parepare (M. Rahmat Samsu Alam, S.H., M.H.). Kehadiran mereka memberikan dimensi yang kaya dan beragam dalam pemahaman terhadap tema yang diangkat.

Gambar 1. Peserta Kegiatan



Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah "Ada Apa dengan MK: Analisis Putusan MK Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres". Diskusi ini berlangsung di Aula IAIN Parepare, menjadi platform yang sangat relevan dan strategis bagi mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Parepare untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang mendalam mengenai isu hukum tatanegara yang tengah berkembang. Sesi seminar dan Q&A menciptakan ruang bagi mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, dan memperoleh jawaban langsung dari para pemateri yang ahli di bidangnya. Interaksi yang terjalin membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan juga memicu beragam sudut

pandang dalam mengeksplorasi implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Gambar 2. Pemaparan Materi



Kehadiran mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Parepare turut memperkaya diskusi dengan beragam perspektif dan pandangan yang mereka bawa. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dan politik, tetapi juga menjadi ajang untuk bertukar ide dan pandangan yang memperkaya pengetahuan kolektif. Dengan demikian, kegiatan pendidikan politik hukum ini tidak hanya berhasil dalam penyampaian materi yang informatif, tetapi juga dalam menciptakan ruang diskusi yang produktif serta memupuk semangat mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi yang akan datang.

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Mendalam

Mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu krusial dalam hukum tatanegara, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Mereka dapat memahami implikasi serta konteks hukum dan politik yang terkait dengan putusan tersebut.

2. Peningkatan Wawasan

Melalui materi yang disampaikan oleh para pemateri yang ahli di bidangnya, mahasiswa mendapatkan peningkatan wawasan dalam hal pemahaman terhadap hukum dan politik. Diskusi yang beragam juga membuka cakrawala baru dalam memahami isu-isu kompleks dalam hukum tatanegara.

3. Keterlibatan Aktif Mahasiswa

Adanya sesi Tanya Jawab (Q&A) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan para pemateri, mendorong keterlibatan aktif mereka dalam diskusi dan pertukaran ide. Hal ini membangun rasa percaya diri untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam Pemilihan Presiden mendatang.

4. Pertukaran Perspektif

Kehadiran mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Parepare memperkaya diskusi dengan beragam sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Ini

memberikan kesempatan bagi mereka untuk memahami beragam pandangan serta untuk saling bertukar ide, menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

5. Stimulasi Diskusi Produktif

Kegiatan ini menciptakan ruang untuk diskusi yang produktif dan membangun semangat mahasiswa untuk berbicara, bertanya, dan mendiskusikan isu-isu penting. Ini tidak hanya memperluas wawasan mereka, tetapi juga meningkatkan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis.

6. Kesiapan dalam Partisipasi Demokratis

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesiapan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dan politik, mereka siap untuk mengambil peran dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan visi dan nilai-nilai yang mereka anut.

7. Peningkatan Kapasitas Pemimpin Masa Depan

Kegiatan ini berkontribusi pada pembentukan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan yang terlatih, terinformasi, dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang mendalam, mereka dapat menjadi pemimpin yang mampu mengambil putusan yang lebih baik untuk kepentingan negara dan masyarakat.

D. Kesimpulan

Kegiatan pendidikan politik hukum bagi mahasiswa menjelang Pemilihan Presiden tahun 2024 telah menjadi wadah yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan persiapan mahasiswa dalam menghadapi proses demokrasi yang mendatang. Melalui metode seminar dan sesi Tanya Jawab yang melibatkan pemateri yang kompeten, kegiatan ini mampu mencapai sejumlah hasil yang penting. Hasil utama dari kegiatan ini adalah pemberian pemahaman yang lebih dalam terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih luas tentang implikasi hukum dan politik yang relevan dengan putusan tersebut. Selain itu, kegiatan ini membangun keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi dan pertukaran ide, memupuk semangat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratisasi. Kehadiran mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Parepare juga memberikan dimensi yang kaya dengan berbagai perspektif yang beragam. Dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Presiden tahun 2024, kegiatan ini berhasil memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk menjadi pemilih yang terinformasi dan bertanggung jawab. Diharapkan bahwa pemahaman yang didapat dari kegiatan ini akan membawa dampak positif dalam partisipasi mereka dalam proses demokrasi masa depan.

Referensi

Buku:

- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81.

Jurnal:

- Febriansyah, F., & Prayitno, S. (2023). Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres. *Jurnal Mitra*, 2(3).
- Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap

- Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 148-167.
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2019). Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *Justitia et Pax*, 35(2).
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 135-153.
- Aulia, S. S., & Pitakon, F. A. (2023). Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi: Grand Corruption. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1044-1053.